



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2026) pp: 12100-12108

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Program Makan Bergizi Gratis sebagai Instrumen Politik Janji Pemilu: Analisis Kebijakan Anggaran dan Dampaknya terhadap Kualitas Pendidikan Indonesia dalam Menyongsong Indoensia Emas 2045.

G. Ginanjar Masruri, Heru Nugraha
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
13240220015@student.uinsgd.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai instrumen politik janji pemilu, kebijakan anggaran, dan intervensi peningkatan kualitas pendidikan dalam kerangka visi Indonesia Emas 2045. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kepustakaan, melalui telaah terhadap produk hukum, dokumen anggaran, artikel jurnal, dan laporan kebijakan yang membahas konstruksi politik MBG, desain anggarannya, serta dampaknya terhadap gizi dan pendidikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa MBG dikonstruksi sebagai legacy project yang menggabungkan dimensi simbolik (citra dan legitimasi pemerintah), substantif (perbaikan gizi, kehadiran, dan konsentrasi belajar), dan struktural (prioritas dalam politik anggaran), dengan pagu Rp71 triliun di APBN 2025 atau sekitar 9–10 persen dari total anggaran pendidikan, sehingga berpotensi menimbulkan trade off dengan investasi struktural pendidikan seperti peningkatan kualitas guru dan sarana prasarana. Di sisi hasil, MBG berpotensi memperkuat prasyarat dasar pembelajaran dan berkontribusi pada penurunan stunting, peningkatan kehadiran, serta capaian akademik, sehingga dapat dibaca sebagai kebijakan jembatan antara pemenuhan hak gizi–pendidikan dan pembangunan SDM unggul. Namun, pembahasan juga menegaskan adanya risiko politisasi, ketergantungan pada siklus pemilu, tekanan fiskal, kelemahan tata kelola (termasuk kasus mutu dan keamanan pangan, distribusi, serta disparitas antar daerah), dan kurangnya sinergi dengan program peningkatan mutu pendidikan lainnya. Temuan ini mengimplikasikan perlunya desain kebijakan dan anggaran MBG yang lebih berkelanjutan, akuntabel, dan terintegrasi, disertai penguatan regulasi, kapasitas pelaksana, dan evaluasi berbasis bukti agar program benar-benar menjadi instrumen pembangunan pendidikan dan SDM jangka panjang, bukan sekadar alat pemenuhan dan komodifikasi janji politik

Kata kunci: Makan Bergizi Gratis; Politik Anggaran; Kualitas Pendidikan; Indonesia Emas 2045

1. Latar Belakang

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir sebagai salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo–Gibran yang dikaitkan erat dengan janji kampanye untuk menekan stunting, memperbaiki gizi anak, dan mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu menyokong agenda Indonesia Emas 2045. Program ini diproyeksikan bukan sekadar sebagai intervensi teknis di bidang gizi, melainkan sebagai instrumen strategis untuk memperkuat kualitas pendidikan melalui perbaikan kondisi fisik dan psikososial peserta didik (Aprillia, Umy, & Azzahra, 2025). Dalam narasi politik, MBG kerap diposisikan sebagai legacy project pemerintahan yang diharapkan menjadi simbol keberhasilan pemenuhan janji pemilu di sektor kesejahteraan sosial dan pendidikan, sehingga wajar jika kemudian program ini menjadi fokus sorotan publik dan akademik.

Secara hukum, MBG bertumpu pada kerangka konstitusional yang menegaskan kewajiban negara memenuhi hak atas kesejahteraan dan gizi yang layak bagi warga negara, sebagaimana tercermin dalam Pasal 28H dan Pasal 34 UUD 1945. Penjabaran lebih operasional tampak dalam regulasi turunan, salah satunya melalui pengaturan mengenai badan dan tata kelola gizi nasional yang memberi dasar institusional bagi penyelenggaraan program makanan bergizi bagi anak sekolah, sehingga negara tidak hanya mengakui hak atas gizi dan pendidikan secara normatif, tetapi juga membangun perangkat kelembagaan untuk mewujudkannya. Kajian yuridis menunjukkan bahwa keberadaan MBG dapat dibaca sebagai bentuk kebijakan afirmatif negara dalam memenuhi hak atas gizi dan pendidikan, sekaligus menguji sejauh mana desain regulasi mampu menjamin akuntabilitas, efektivitas, dan perlindungan terhadap potensi penyimpangan dalam implementasinya (Nul & Yuliana, 2025).

Program Makan Bergizi Gratis sebagai Instrumen Politik Janji Pemilu: Analisis Kebijakan Anggaran dan Dampaknya terhadap Kualitas Pendidikan Indonesia dalam Menyongsong Indoensia Emas 2045.

Dalam perspektif perbandingan, kedudukan MBG ini sejalan dengan praktik di berbagai negara yang telah lebih dahulu mengembangkan program makan bergizi gratis atau makan sekolah universal berbasis hak. India, misalnya, melalui Mid-Day Meal Scheme menyediakan makan siang bergizi bagi ratusan juta anak usia sekolah dasar sebagai bagian dari pemenuhan hak atas pendidikan dasar dan pengurangan kelaparan anak, sementara Brasil mengembangkan Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) yang menjamin makanan gratis bagi siswa sekolah publik dengan dasar hukum federal dan keterkaitan kuat dengan kebijakan pangan dan pembangunan pedesaan. Negara-negara seperti Finlandia dan Swedia juga menerapkan makan sekolah gratis universal sebagai bagian dari kebijakan negara kesejahteraan, yang diakui berkontribusi pada peningkatan kesehatan, capaian akademik, dan pengurangan kesenjangan sosial. Dengan demikian, secara konseptual MBG tidak berdiri sendiri, tetapi berada dalam arus kebijakan global yang menempatkan makanan bergizi di sekolah sebagai instrumen pemenuhan hak atas gizi dan pendidikan secara simultan, sekaligus ujian bagi konsistensi negara dalam menerjemahkan mandat konstitusi ke dalam desain regulasi dan tata kelola yang efektif.

Dalam tataran kebijakan publik, MBG beroperasi di tengah dinamika politik anggaran yang kompleks, di mana alokasi dana besar untuk program makanan bergizi harus dinegosiasikan dalam kerangka APBN dan perencanaan pembangunan jangka panjang. Hal ini menjadikan MBG bukan hanya isu teknokratis, tetapi juga arena tarik-menarik kepentingan politik, karena penentuan prioritas anggaran berimplikasi pada potensi pengurangan porsi untuk program pendidikan lain seperti peningkatan kompetensi guru, perbaikan sarana prasarana, dan penguatan kurikulum. Analisis kebijakan menunjukkan bahwa pilihan mengalokasikan anggaran signifikan bagi MBG mengandung dimensi simbolik dan elektoral, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah program ini didesain terutama sebagai investasi jangka panjang bagi kualitas pendidikan, atau lebih dominan sebagai instrumen pemenuhan janji pemilu yang cenderung populis (Ratulangi, 2025; Widyasari, Larasati, & Alam, 2025).

Di sisi empiris, berbagai penelitian terdahulu umumnya menegaskan potensi manfaat MBG bagi proses pendidikan. Penyediaan makanan bergizi di sekolah terbukti dapat memperbaiki status gizi, menurunkan risiko kelelahan dan kelaparan di kelas, serta mendorong peningkatan kehadiran dan konsentrasi belajar siswa, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap produktivitas dan hasil belajar (Andreas et al., 2025). Guru dan pemangku kepentingan sekolah juga memandang program makan bergizi sebagai dukungan penting bagi kesiapan fisik dan psikologis peserta didik, serta sebagai faktor yang dapat memperkuat motivasi dan iklim belajar di ruang kelas (Furkan et al., 2025). Selain itu, beberapa kajian menunjukkan bahwa pengelolaan rantai pasok MBG yang melibatkan pelaku usaha lokal dapat mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar sekolah, sehingga memberi dampak ganda di bidang pendidikan dan ekonomi lokal (Widyasari et al., 2025).

Namun, literatur juga mencatat bahwa MBG tidak pernah lepas dari dimensi politik dan wacana media. Analisis wacana terhadap pemberitaan menunjukkan bahwa program ini sering menjadi arena kontestasi narasi antara pihak pendukung dan pihak kritis, terutama terkait isu hoaks, keraguan atas kesiapan anggaran, serta kekhawatiran akan beban fiskal jangka panjang (Setyawan & Ibrahim, 2025). Dalam beberapa kasus, MBG dibingkai sebagai kebijakan populis yang menjanjikan manfaat besar namun dihadapkan pada persoalan implementasi di lapangan, seperti standar kebersihan dapur, kapasitas pengelolaan di sekolah, dan kesenjangan fasilitas antar daerah (Fasha & Tesniyadi, 2024; Widyasari et al., 2025). Kondisi ini memperkuat argumen bahwa MBG perlu dibaca tidak hanya sebagai program teknis gizi, tetapi juga sebagai fenomena politik yang berkelindan dengan logika elektoral, citra pemerintahan, dan konsistensi politik anggaran dalam jangka panjang.

Mencermati perkembangan tersebut, tampak bahwa kajian yang ada telah banyak mengulas dampak MBG dari perspektif gizi, kesehatan, dan aspek proses belajar, serta mulai menyentuh dimensi hukum dan wacana politik di sekitar program. Namun, belum banyak penelitian yang secara eksplisit menempatkan MBG sebagai instrumen politik janji pemilu dan mengaitkannya secara sistematis dengan politik anggaran serta implikasinya terhadap kualitas pendidikan dalam horizon Indonesia Emas 2045 (Purnomo, Putikadyanto, & Nur, 2025). Kesenjangan inilah yang ingin diisi oleh penelitian ini, dengan cara menganalisis bagaimana janji politik yang terinstitusionalisasi dalam kebijakan anggaran MBG benar-benar dapat (atau gagal) menjadi instrumen peningkatan kualitas pendidikan dan pembangunan SDM unggul, sekaligus menelaah potensi problem keberlanjutan serta konsistensi kebijakan pendidikan jangka panjang dalam kerangka Indonesia Emas 2045 (Universitas Cenderawasih, 2025)

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode library research (studi kepustakaan). Data yang dianalisis berasal dari sumber-sumber sekunder, meliputi produk hukum dan kebijakan terkait Program Makan Bergizi Gratis, dokumen konstitusional, peraturan perundang-undangan, peraturan presiden, serta dokumen resmi pemerintah yang mengatur pembangunan pendidikan dan gizi nasional. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan artikel-artikel jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan yang relevan dengan tema politik janji pemilu, politik anggaran, kebijakan gizi, serta kualitas pendidikan dalam kerangka Indonesia Emas 2045.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap literatur dan dokumen yang relevan, kemudian diseleksi berdasarkan kesesuaian topik, kredibilitas, dan kebaruan. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis isi dan analisis tematik, dengan langkah-langkah: mengorganisasi dokumen, mengidentifikasi tema-tema utama (seperti konstruksi MBG sebagai janji politik, desain kebijakan anggaran, dan dampak terhadap pendidikan), lalu mensintesiskan berbagai temuan untuk membangun argumentasi yang utuh. Hasil analisis disajikan dalam bentuk uraian deskriptif-analitis yang menghubungkan kerangka teoritis, konteks kebijakan, dan temuan empiris yang relevan

3. Hasil dan Diskusi

1. MBG sebagai Instrumen Politik Janji Pemilu

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dikonstruksi dalam narasi kampanye sebagai jawaban konkret atas masalah stunting, gizi buruk, dan ketimpangan kualitas pendidikan, sehingga tampil bukan hanya sebagai program teknis, tetapi sebagai simbol komitmen moral pasangan calon terhadap masa depan anak Indonesia. Dalam perspektif teori politik janji pemilu dan populisme kebijakan sosial, janji program yang manfaatnya mudah dirasakan langsung oleh pemilih seperti pemberian makanan bergizi harian di sekolah—memiliki daya tarik elektoral tinggi karena memberikan “kehadiran negara” yang kasat mata di level akar rumput. Narasi ini diperkuat oleh klaim bahwa MBG akan meningkatkan produktivitas belajar melalui perbaikan gizi, konsentrasi, dan kehadiran siswa, sehingga secara substantif terkait dengan agenda peningkatan kualitas pendidikan nasional (Andreas et al., 2025). Dari sisi kemaslahatan, sebagian kalangan bahkan membaca MBG sebagai kebijakan yang sejalan dengan prinsip perlindungan jiwa dan generasi (hifz al-nafs dan hifz al-nasl), sehingga memudahkan pembingkai program ini sebagai janji politik yang “bernilai ibadah” sekaligus strategis bagi perbaikan masa depan bangsa (Manalu et al., 2025).

Posisi MBG sebagai “program unggulan” dan legacy project pemerintahan Prabowo–Gibran menempatkannya dalam medan politik yang sarat dengan pertarungan wacana dan kepentingan, karena ia sekaligus mengandung dimensi program sosial dan dimensi simbolik kekuasaan (Azzahra, Nursanti, & Arindawati, 2025). Di satu sisi, MBG dipromosikan sebagai kebijakan transformasional yang akan mengakselerasi lahirnya generasi emas 2045 melalui jalur perbaikan gizi, penurunan stunting, dan penguatan motivasi belajar siswa; dalam kerangka teori kebijakan sosial, narasi semacam ini membingkai MBG sebagai investasi jangka panjang pada modal manusia, sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan hari ini dipresentasikan sebagai “tabungan” produktivitas di masa depan. Di sisi lain, analisis kebijakan dan wacana media menunjukkan bahwa MBG juga diperdebatkan sebagai kebijakan populis berbiaya tinggi yang berpotensi menyingkirkan prioritas lain dalam pendidikan—seperti peningkatan kualitas guru, perbaikan sarana prasarana, dan inovasi kurikulum—serta rentan dijadikan komoditas politik dalam perdebatan pro–kontra di ruang publik (Setyawan & Ibrahim, 2025).

Penguatan status MBG dalam kerangka hukum, misalnya melalui pengaturan kelembagaan dan tata kelola dalam Perpres dan regulasi turunan, menjadikannya bukan sekadar janji kampanye, tetapi janji yang telah terinstitusionalisasi dalam sistem kebijakan; konsekuensinya, keberhasilan atau kegagalan program tidak lagi hanya dinilai sebagai variasi implementasi teknis, melainkan sebagai indikator konsistensi negara dalam memenuhi mandat konstitusi sekaligus konsistensi rezim dalam menepati janji pemilu (Nul & Yuliana, 2025). Secara teoritis, hal ini menempatkan MBG sebagai instrumen politik janji pemilu yang bergerak di tiga ranah sekaligus: pertama, ranah simbolik, di mana program ini membentuk citra dan legitimasi pemerintah di mata warga; kedua, ranah substantif, di mana keberhasilan perbaikan gizi dan kualitas pendidikan menjadi ukuran konkret manfaat program; dan ketiga, ranah struktural, di mana MBG mengonstruksi ulang prioritas dalam politik anggaran dan tata kelola pemerintahan, termasuk siapa yang diuntungkan dalam rantai kebijakan dan

bagaimana struktur kekuasaan fiskal serta birokratis dikukuhkan melalui program ini. Dalam kombinasi tiga ranah tersebut, MBG dapat dipahami sebagai arena di mana logika kesejahteraan, logika pembangunan SDM, dan logika elektoral saling bertemu, berkolaborasi, tetapi sekaligus berpotensi saling menegasikan jika tidak dikelola secara hati-hati.

2. Analisis Kebijakan Anggaran Program MBG

Analisis kebijakan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dapat dilepaskan dari kerangka politik anggaran di mana keputusan alokasi dana publik selalu merupakan hasil kombinasi pertimbangan teknokratis dan kalkulasi politik. Dalam APBN 2025, pemerintah menetapkan pagu anggaran MBG sebesar Rp71 triliun yang seluruhnya ditempatkan dalam belanja pemerintah pusat, dengan realisasi hingga akhir 2025 sekitar Rp51,5 triliun atau 72,5 persen dari pagu tersebut. Anggaran ini diambil dari total anggaran pendidikan nasional yang pada 2025 mencapai Rp724,3 triliun, setara 20 persen dari total belanja negara, sehingga secara kasar porsi MBG setara dengan sekitar 9–10 persen dari keseluruhan anggaran pendidikan tahun 2025. Secara formal, penganggaran MBG berlandaskan mandat konstitusi mengenai kewajiban negara memenuhi hak atas kesejahteraan dan pendidikan warga, yang kemudian dijabarkan dalam regulasi turunan seperti Peraturan Presiden tentang kelembagaan gizi dan tata kelola program, serta diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan APBN/APBD sebagai program prioritas nasional. Dalam perspektif kebijakan publik, penetapan MBG sebagai program prioritas berarti pemerintah menempatkannya dalam kategori high politics of budgeting, yakni program yang dilindungi dan dipromosikan secara aktif dalam proses perencanaan dan pembahasan anggaran. Hal ini sejalan dengan temuan kajian yang menunjukkan bahwa MBG diposisikan sebagai kebijakan strategis untuk peningkatan kesehatan dan kapasitas belajar siswa, dengan justifikasi bahwa investasi gizi di tingkat dasar akan memberikan return jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia dan daya saing bangsa (Widyasari, Larasati, & Alam, 2025).

Secara skematis, posisi MBG dalam kerangka anggaran pendidikan dapat digambarkan sebagai berikut:

Komponen	Nilai / Deskripsi
Pagu anggaran MBG 2025	Rp71 triliun (belanja pemerintah pusat)
Realisasi anggaran MBG 2025	Sekitar Rp51,5 triliun ($\pm 72,5\%$ dari pagu)
Total anggaran pendidikan 2025	Rp724,3 triliun ($\pm 20\%$ dari total belanja negara)
Perkiraan porsi MBG dalam anggaran pendidikan	Sekitar 9–10% dari total anggaran pendidikan 2025
Karakter belanja MBG	Belanja konsumsi jangka pendek (makanan harian siswa)
Program pendidikan yang berpotensi terkena <i>trade-off</i>	Kualitas/kesejahteraan guru, sarpras, kurikulum, asesmen, tata kelola

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa MBG adalah pos belanja yang sangat besar dan menempati porsi signifikan dalam fungsi pendidikan, sekaligus menjadi belanja yang sifatnya konsumsi jangka pendek. Posisi ini membuat MBG sangat kasat mata di tingkat akar rumput dan politis menarik, tetapi di saat yang sama memunculkan kekhawatiran mengenai ruang fiskal untuk investasi struktural pendidikan yang cenderung kurang tampak namun menentukan mutu jangka panjang.

Namun, besarnya alokasi anggaran untuk MBG secara potensial menciptakan *trade-off* dengan program pendidikan lain, terutama dalam konteks fiskal yang terbatas di mana total ruang belanja negara dan porsi anggaran pendidikan sudah dibatasi oleh ketentuan konstitusional dan komitmen kebijakan makro. Dalam kerangka teori politik anggaran, setiap penambahan porsi bagi satu program pada dasarnya merupakan hasil dari proses prioritization dan bargaining di antara berbagai kepentingan sektor, sehingga kenaikan alokasi untuk MBG hampir pasti menyempitkan ruang fiskal bagi program lain, kecuali jika terjadi ekspansi total belanja negara atau peningkatan penerimaan yang signifikan. Sejumlah analisis kebijakan mengingatkan bahwa fokus yang terlalu besar pada pembiayaan konsumsi jangka pendek, seperti penyediaan makanan harian, berisiko mengurangi ruang fiskal bagi investasi struktural dalam pendidikan yang secara teoritis justru menjadi penentu utama kualitas jangka panjang, misalnya peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru, pembangunan dan

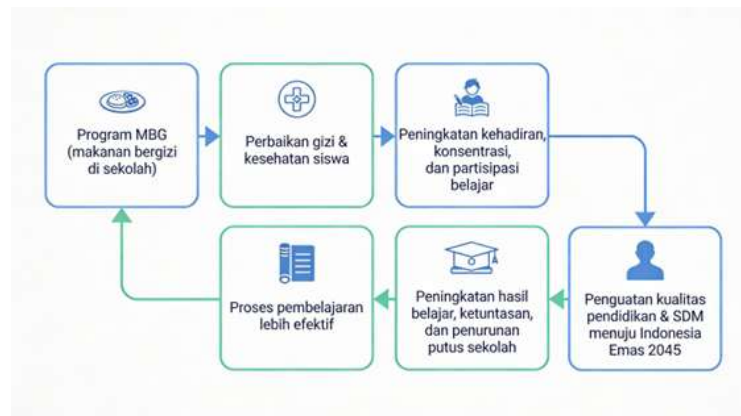
rehabilitasi sarana prasarana, penguatan kurikulum, serta pengembangan sistem asesmen dan tata kelola pendidikan yang akuntabel (Ratulangi, 2025; Weyana et al., 2025).

Di titik ini tampak jelas ketegangan antara rasionalitas teknokratis dan rasionalitas politik. Rasionalitas teknokratis, yang bertumpu pada pendekatan kebijakan berbasis bukti, menekankan efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan dengan cara memastikan bahwa anggaran MBG diintegrasikan secara sinergis dengan program peningkatan mutu pendidikan lain, dikalibrasi sesuai hasil evaluasi dampak nyata terhadap indikator belajar, serta tidak mengorbankan investasi jangka panjang yang bersifat struktural. Sebaliknya, rasionalitas politik cenderung mengutamakan program yang manfaatnya cepat terlihat oleh publik, mudah dikomunikasikan, dan dapat diklaim sebagai bukti keberhasilan pemerintah, sehingga mendorong kecenderungan mempertahankan bahkan memperbesar besaran anggaran MBG demi menjaga citra, legitimasi, dan kontinuitas narasi pemenuhan janji pemilu, meskipun efektivitas jangka panjangnya terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan produktivitas SDM masih memerlukan pembuktian empiris yang lebih kuat (Purnomo, Putikadyanto, & Nur, 2025). Dalam perspektif teori kebijakan publik, ketegangan ini menandakan bahwa MBG berada di persimpangan antara logika welfare-enhancing dan logika vote-seeking, sehingga desain dan implementasi anggarannya harus terus diawasi agar tidak bergeser dari instrumen pembangunan pendidikan menjadi sekadar instrumen reproduksi dukungan politik

3. Dampak Program MBG terhadap Kualitas Pendidikan

Dari perspektif pendidikan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diposisikan sebagai intervensi gizi yang secara langsung menasar input peserta didik yakni kondisi fisik, kesehatan, dan kesiapan belajar yang dalam kerangka teori kualitas pendidikan sangat menentukan proses dan hasil pembelajaran. Berbagai kajian menunjukkan bahwa pemberian makanan bergizi di sekolah berkontribusi pada perbaikan status gizi, mengurangi rasa lapar saat belajar, dan menurunkan kelelahan fisik sehingga siswa lebih siap secara fisik dan kognitif mengikuti pembelajaran (Andreas et al., 2025). Di tingkat perilaku sekolah, MBG juga ditemukan dapat meningkatkan kehadiran dan kedisiplinan siswa, karena adanya insentif berupa makanan yang dinikmati setiap hari, serta membantu mengurangi beban ekonomi keluarga yang sebelumnya kesulitan menyediakan bekal makanan bagi anak (Furkan et al., 2025). Temuan-temuan tersebut sejalan dengan logika kebijakan yang melihat gizi dan kesehatan sebagai prasyarat dasar bagi tercapainya proses belajar yang efektif dan lingkungan belajar yang kondusif di sekolah dasar maupun menengah (Maliki et al., 2025).

Jika dikaitkan dengan indikator kualitas pendidikan, MBG berkontribusi terutama pada dimensi akses dan proses pembelajaran, yang kemudian bermuara pada perubahan outcome seperti hasil belajar, ketuntasan, dan potensi penurunan angka putus sekolah (drop out). Program ini bekerja terutama pada level input peserta didik: perbaikan gizi, kesehatan, dan kesiapan fisik-psikologis untuk belajar, yang dalam kerangka teori mutu pendidikan merupakan prasyarat penting bagi proses pembelajaran yang efektif di kelas (Andreas et al., 2025). Ketika anak datang ke sekolah dalam keadaan tidak lapar, lebih bertenaga, dan secara emosional lebih stabil, kehadiran cenderung meningkat, konsentrasi lebih terjaga sepanjang jam pelajaran, dan partisipasi dalam kegiatan pembelajaran lebih optimal. Dalam jangka pendek, hal ini tercermin pada penurunan ketidakhadiran, peningkatan kedisiplinan, dan lebih sedikit gangguan perilaku di kelas, yang kemudian memberi ruang bagi guru untuk mengelola pembelajaran dengan lebih fokus dan terstruktur. Secara konseptual, hubungan ini dapat diilustrasikan melalui alur berikut:



Ilustrasi ini menunjukkan bahwa MBG bukanlah satu-satunya faktor penentu hasil belajar, tetapi berfungsi sebagai enabler yang memperkuat fondasi biologis dan psikososial peserta didik sehingga intervensi pendidikan lain (kurikulum, pedagogi, asesmen) dapat bekerja lebih optimal (Andreas et al., 2025; Furkan et al., 2025). Tanpa kualitas pengajaran, kurikulum yang relevan, dan lingkungan belajar yang mendukung, dampak MBG terhadap nilai dan kompetensi jangka panjang tetap akan terbatas, sehingga sinergi dengan program peningkatan mutu pendidikan lainnya menjadi keharusan, bukan pilihan.

Dalam jangka panjang, perbaikan gizi dan kesehatan peserta didik yang konsisten dipandang sebagai bagian integral dari investasi pembangunan SDM unggul. Berbagai studi menunjukkan bahwa anak yang tumbuh dengan gizi baik cenderung memiliki kapasitas kognitif lebih tinggi, daya tahan tubuh yang lebih kuat, serta produktivitas yang lebih baik ketika memasuki usia produktif, sehingga berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas angkatan kerja dan daya saing ekonomi. Kerangka pikir ini membuat MBG sering dikaitkan dengan agenda besar Indonesia Emas 2045, di mana bonus demografi hanya akan menjadi berkah jika diimbangi dengan generasi yang sehat, berpendidikan, dan produktif (Purnomo, Putikadyanto, & Nur, 2025; Universitas Cenderawasih, 2025). Dengan kata lain, MBG dapat dipahami sebagai kebijakan jembatan: di satu sisi memenuhi hak dasar gizi dan pendidikan anak, di sisi lain menyiapkan prasyarat biologis dan psikososial bagi terbentuknya SDM yang mampu mengisi struktur ekonomi bernilai tambah tinggi di masa depan.

Namun, secara teoritis efektivitas jembatan ini sangat ditentukan oleh tiga faktor utama. Pertama, konsistensi kebijakan, baik dari sisi pendanaan maupun keberlanjutan program lintas siklus politik, agar dampak gizi dan kesehatan dapat terakumulasi secara jangka panjang dan tidak terputus oleh perubahan rezim atau prioritas anggaran sesaat. Kedua, kualitas implementasi, meliputi standar menu dan keamanan pangan, ketepatan sasaran penerima, kapasitas pengelolaan di sekolah, serta pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan yang merusak kepercayaan publik. Ketiga, sinergi dengan program peningkatan mutu pendidikan lainnya, seperti penguatan kompetensi guru, perbaikan sarana prasarana, pengembangan kurikulum yang relevan, dan sistem asesmen yang mendorong pembelajaran bermakna. Tanpa kombinasi tiga faktor ini, MBG berisiko berhenti pada level pemenuhan kebutuhan gizi jangka pendek yang penting tetapi belum cukup untuk memastikan transformasi kualitas pendidikan dan SDM sebagaimana diidealkan dalam visi Indonesia Emas 2045

4. Tantangan dan Risiko Kebijakan MBG

Sebagai kebijakan yang lahir dari janji kampanye dan diproyeksikan sebagai legacy project pemerintahan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengandung risiko politisasi yang tinggi dan potensi ketergantungan pada siklus pemilu serta pergantian rezim. Di satu sisi, keterikatan MBG dengan citra politik penguasa membuat program ini mendapatkan dukungan kuat pada fase awal implementasi; namun di sisi lain, hal tersebut membuka kemungkinan bahwa keberlanjutan program akan sangat bergantung pada kepentingan politik pemerintahan berikutnya, yang bisa saja memilih untuk mengurangi, memodifikasi, atau bahkan menghentikan program demi membangun identitas kebijakan baru. Analisis framing dan wacana media menunjukkan bahwa MBG sering menjadi arena kontestasi narasi antara yang memuji sebagai wujud keberpihakan pada rakyat kecil dan yang mengkritik sebagai kebijakan populis berbiaya tinggi sehingga keputusan atas kelanjutan program berpotensi lebih dipengaruhi pertimbangan elektoral daripada evaluasi objektif atas efektivitasnya (Azzahra, Nursanti, & Arindawati, 2025; Setyawan & Ibrahim, 2025).

Di samping itu, MBG menghadapi tantangan serius terkait keberlanjutan pendanaan, tata kelola, dan pengawasan program, yang secara langsung berimplikasi pada konsistensi kebijakan pendidikan jangka panjang. Dari sisi fiskal, kebutuhan anggaran yang sangat besar untuk pembiayaan konsumsi harian menuntut komitmen jangka panjang dalam APBN/APBD dan manajemen risiko fiskal yang hati-hati, agar tidak terus-menerus menggerus ruang fiskal bagi investasi struktural di sektor pendidikan seperti peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru, pembangunan serta rehabilitasi sarana prasarana, dan inovasi kurikulum (Ratulangi, 2025; Weyana et al., 2025). Jika beban anggaran MBG tidak diimbangi desain pembiayaan yang sehat dan pengaturan prioritas yang jelas, program justru berpotensi menjadi sumber ketegangan anggaran antarprogram pendidikan dan menimbulkan resistensi di kalangan pemangku kepentingan yang merasa sektor atau programnya “terkalahkan” oleh belanja konsumsi jangka pendek.

Dari perspektif hukum dan tata kelola, kajian yuridis menegaskan pentingnya kejelasan regulasi mengenai pembagian kewenangan, standar pelaksanaan, mekanisme pengawasan, dan sanksi, karena tanpa kerangka hukum yang kuat program berisiko menghadapi berbagai persoalan di lapangan, mulai dari kualitas makanan yang tidak seragam, lemahnya akuntabilitas penggunaan anggaran, hingga potensi penyimpangan pada level

pelaksana (Nul & Yuliana, 2025; Widyasari, Larasati, & Alam, 2025). Tantangan ini semakin nyata ketika muncul kasus-kasus operasional seperti dugaan keracunan makanan akibat standar higienitas dan keamanan pangan yang tidak dipatuhi, keterlambatan distribusi yang mengganggu jadwal makan dan proses belajar, kecelakaan dalam rantai distribusi logistik karena armada dan protokol keselamatan yang tidak memadai, serta keluhan peserta didik dan orang tua terkait kualitas dan porsi makanan yang dinilai tidak sepadan dengan nilai anggaran per porsi yang ditetapkan. Situasi ini memperlihatkan bahwa tata kelola MBG tidak hanya soal ketersediaan dana, tetapi juga kapasitas manajerial penyedia, sistem pengadaan dan pengawasan yang transparan, serta kemampuan pemerintah daerah dan sekolah mengelola rantai pasok secara aman dan efisien.

Persoalan lain yang mengemuka adalah disparitas kapasitas pelaksana antar daerah. Daerah dengan infrastruktur memadai, akses pemasok yang baik, dan kapasitas birokrasi yang kuat cenderung mampu menyediakan makanan dengan kualitas lebih baik dan distribusi lebih tepat waktu, sementara daerah terpencil menghadapi kendala akses, minimnya penyedia jasa katering/lauk-pauk yang memenuhi standar, hingga tingginya biaya logistik yang menggerus nilai gizi riil yang sampai ke tangan siswa. Hal ini berpotensi melahirkan “ketidakadilan baru” di mana program nasional yang dimaksudkan untuk pemerataan justru menghasilkan kualitas layanan yang timpang antarwilayah. Dalam konteks akuntabilitas, lemahnya sistem monitoring dan evaluasi berbasis data—misalnya terkait kasus keracunan, sisa makanan, keterlambatan distribusi, atau deviasi menu dari standar—dapat membuat masalah-masalah tersebut berulang tanpa perbaikan sistemik yang memadai.

Kondisi-kondisi tersebut pada akhirnya berpengaruh pada konsistensi kebijakan pendidikan jangka panjang. Kegagalan mengelola tantangan dan risiko MBG dapat menggerus kepercayaan publik terhadap intervensi negara di bidang pendidikan dan gizi, mengganggu stabilitas perencanaan program, serta mengalihkan fokus dari agenda strategis peningkatan mutu pendidikan yang seharusnya berjalan secara berkelanjutan melampaui siklus politik lima tahunan (Purnomo, Putikadyanto, & Nur, 2025). Secara teoritis, MBG berpotensi menjadi pilar penting dalam ekosistem kebijakan pendidikan dan pembangunan SDM; tetapi tanpa penguatan desain pendanaan, tata kelola, pengawasan, dan kapasitas pelaksana, program ini juga dapat berubah menjadi sumber krisis legitimasi dan fiskal yang justru menghambat tujuan jangka panjang peningkatan kualitas pendidikan di era Indonesia Emas 2045

4. Kesimpulan

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berfungsi sekaligus sebagai instrumen politik janji pemilu, instrumen kebijakan anggaran, dan intervensi pendidikan–gizi yang kompleks. Dari sisi politik, MBG dikonstruksi sebagai simbol komitmen moral dan politik pemerintahan Prabowo–Gibran untuk menjawab masalah stunting, gizi buruk, dan ketimpangan kualitas pendidikan, sehingga ia tidak hanya tampil sebagai program teknis, tetapi juga sebagai legacy project yang mengikat citra dan legitimasi rezim pada keberhasilan pelaksanaannya. Penguatan MBG dalam kerangka hukum dan kebijakan menjadikannya janji politik yang terinstitusionalisasi, sehingga tingkat keberhasilan atau kegagalannya akan dibaca publik sebagai ukuran konsistensi negara dan pemerintah dalam memenuhi mandat konstitusi serta janji pemilu. Dari perspektif politik anggaran, MBG menempati posisi yang sangat strategis sekaligus problematis. Secara nominal, pagu Rp71 triliun dalam APBN 2025—dengan realisasi sekitar Rp51,5 triliun—menjadikan MBG sebagai pos belanja besar dalam fungsi pendidikan, dengan porsi sekitar 9–10 persen dari total anggaran pendidikan nasional. Di satu sisi, besaran ini mencerminkan prioritas tinggi yang diberikan negara pada perbaikan gizi dan kesehatan siswa sebagai prasyarat peningkatan kualitas SDM; namun di sisi lain, ia memunculkan potensi trade-off yang signifikan dengan program pendidikan lain yang bersifat struktural, seperti peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru, pembangunan sarana prasarana, penguatan kurikulum, dan pengembangan sistem asesmen. Ketegangan antara rasionalitas teknokratis (yang menuntut efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan) dan rasionalitas politik (yang mengejar visibilitas cepat dan daya jual elektoral) menjadikan desain anggaran MBG titik kritis yang harus terus diawasi agar tidak bergeser dari instrumen welfare-enhancing menjadi sekadar instrumen vote-seeking. Dari sudut pandang pendidikan, MBG terbukti berpotensi memperkuat dimensi akses dan proses pembelajaran melalui perbaikan gizi, kesehatan, kehadiran, dan konsentrasi belajar siswa, yang kemudian dapat bermuara pada peningkatan hasil belajar, ketuntasan, serta penurunan angka putus sekolah. Secara teoritis, MBG dapat dibaca sebagai enabler yang memperkuat fondasi biologis dan psikososial peserta didik sehingga intervensi pendidikan lainnya (kurikulum, pedagogi, asesmen) dapat bekerja lebih optimal, sekaligus sebagai kebijakan jembatan yang menghubungkan pemenuhan hak dasar gizi dan pendidikan dengan target strategis pembangunan SDM unggul dalam kerangka Indonesia Emas 2045. Namun, efektivitas jangka panjang MBG sangat ditentukan oleh konsistensi kebijakan lintas siklus politik, kualitas implementasi (standar menu, keamanan pangan, ketepatan sasaran, kapasitas pengelolaan sekolah), dan sinerginya dengan

program peningkatan mutu pendidikan yang lain; tanpa ketiga prasyarat ini, dampak MBG berisiko berhenti pada pemenuhan kebutuhan gizi jangka pendek tanpa memastikan transformasi kualitas pendidikan dan SDM sebagaimana diidealkan. Sisi lain yang sangat menonjol adalah tingginya tantangan dan risiko kebijakan MBG. Sebagai kebijakan yang lahir dari janji kampanye dan ditempatkan sebagai legacy project, MBG mengandung risiko politisasi dan ketergantungan pada siklus pemilu serta pergantian rezim; keberlanjutan program berpotensi lebih ditentukan kalkulasi elektoral daripada evaluasi objektif atas efektivitasnya. Di tingkat implementasi, program dihadapkan pada persoalan keberlanjutan pendanaan, tata kelola, dan pengawasan, yang tercermin antara lain pada kasus-kasus keracunan makanan, keterlambatan distribusi, kecelakaan dalam rantai logistik, disparitas kualitas layanan antar daerah, serta keluhan terkait porsi dan kualitas makanan yang dinilai tidak sepadan dengan nilai anggaran per porsi. Jika tidak direspons dengan penguatan regulasi, kapasitas pelaksana, dan sistem monitoring–evaluasi berbasis data, masalah-masalah ini dapat menggerus kepercayaan publik dan mengganggu stabilitas perencanaan kebijakan pendidikan jangka panjang. Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat ditegaskan bahwa MBG memiliki potensi strategis sebagai pilar kebijakan yang menghubungkan pemenuhan hak dasar gizi, peningkatan kualitas pendidikan, dan pembangunan SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045. Namun, potensi ini berjalan dengan risiko politisasi, ketegangan politik anggaran, dan problem tata kelola yang tidak kecil. Dengan demikian, masa depan MBG sebagai instrumen pembangunan pendidikan sangat ditentukan oleh kemampuan negara dan pemerintah untuk menyeimbangkan logika kesejahteraan dan pembangunan SDM dengan logika elektoral, mengintegrasikan anggaran MBG secara sinergis dengan program peningkatan mutu pendidikan lainnya, serta memperkuat kerangka hukum, tata kelola, dan pengawasan agar program benar-benar menjadi investasi jangka panjang, bukan sekadar ikon politik sesaat..

Referensi

1. Andreas, K., Tambunan, H., Nababan, R., Siagian, R. A., Naiborhu, R., Harianti, S., & Jamaludin, J. (2025). Tinjauan kritis tentang Program Makan Bergizi Gratis terhadap produktivitas belajar siswa. *Nama Jurnal*, 2, xx–xx.
2. Aprillia, N. P., Umy, M., & Azzahra, D. (2025). Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Antara legacy project dan solusi stunting. *Nama Jurnal*, 4(5), 19–22.
3. Azzahra, M. S., Nursanti, S., & Arindawati, W. A. (2025). Analisis framing pemberitaan pro dan kontra Program Makan Bergizi Gratis. *Nama Jurnal*, 12(2), 775–788.
4. Badan Gizi Nasional Republik Indonesia. (2024). Peraturan Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Badan Gizi Nasional.
5. Fasha, S. S., & Tesniyadi, D. (2024). Analisis wacana kritis pada artikel Tempo.co yang berjudul “Dana BOS untuk program makan siang gratis”. *Nama Jurnal*, 4, 15077–15089.
6. Furkan, I. M., Sari, R. A., Eliza, M. F., Nofrizal, D., Junva, F., & Gistituati, N. (2025). Mewujudkan makan bergizi gratis: Perspektif guru SD. *Nama Jurnal*, 10(3), 919–927.
7. Global Child Nutrition Foundation. (2024). School meal programs around the world: Global survey report 2024. Global Child Nutrition Foundation.
8. Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
9. Indonesia. (2012). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227.
10. Indonesia. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 152.
11. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Informasi APBN Tahun Anggaran 2025. Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan RI.
12. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026, Januari 5). Pemerintah salurkan Makan Bergizi Gratis (MBG), ini sasaran utama penerimanya. *Media Keuangan Kemenkeu*.
13. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2025). Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/A/4954/2025 tentang Keamanan Pangan dalam Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Kementerian Kesehatan RI.
14. Maliki, A., Selvi, N., Arifah, A., & Assa, N. S. (2025). Analisis kebijakan Makan Bergizi Gratis Prabowo–Gibran dan dampaknya terhadap kesehatan dan bidang pendidikan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(4), 465–476.
15. Manalu, A. E., Nia, A. E., Chahyani, A. T., & Ambarita, H. M. (2025). Analisis persepsi mahasiswa PPKn UNIMED tentang asas kemaslahatan pada Program Makan Bergizi Gratis dalam tinjauan hukum Islam. *Nama Jurnal*, x(x), 7392–7406.
16. Merlinda, A. A., & Yusuf, Y. (2025). Analisis program makan gratis Prabowo Subianto terhadap strategi peningkatan motivasi belajar siswa di sekolah: Tinjauan dari perspektif sosiologi pendidikan. *Nama Jurnal*, 7(2), 1364–1373.
17. Nul, B., & Yuliana, W. (2025). Implikasi yuridis Perpres Nomor 83 Tahun 2024 terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis. *Nama Jurnal*, 24(2), 267–283.
18. Presiden Republik Indonesia. (2017). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.
19. Presiden Republik Indonesia. (2024). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.
20. Purnomo, A., Putikadyanto, A., & Nur, A. (2025). Program Makan Bergizi Gratis: Analisis kritis transformasi pendidikan Indonesia menuju generasi emas 2045. *Nama Jurnal*, x(x), xx–xx.
21. Ratulangi, Universitas Sam. (2025). Dinamika governance Program Makan Bergizi Gratis. *Dinamika Governance*, 15(1), 153–162.
22. Setyawan, E., & Ibrahim, M. (2025). Analisis wacana berita hoaks tentang Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggunakan pendekatan socio-cognitive Teun A. van Dijk. *Nama Jurnal*, 6(2), xx–xx.

23. Universitas Cenderawasih. (2025). Dampak jangka panjang Program Makan Bergizi Gratis terhadap kesehatan dan keberlanjutan pendidikan. *Nama Jurnal*, 5(2), 130–137.
24. Weyana, A., Khatimah, N., Kamaruddin, S. A., & Awaru, A. O. T. (2025). Rasionalisme dalam kebijakan publik: Analisis dampak Program Makan Bergizi Gratis terhadap kesejahteraan pelajar. *Nama Jurnal*, 3(4), 1969–1976.
25. Widyasari, S. Y., Larasati, A., & Alam, W. Y. (2025). Evaluasi kebijakan Makan Bergizi Gratis di sekolah dasar: Implikasi terhadap kesehatan anak dan pemberdayaan ekonomi lokal. *Nama Jurnal*, 5, 1727–1736.
26. World Food Programme. (2020). State of school feeding worldwide 2020. World Food Programme